



BULETIN

PARLEMENTARIA

NOMOR: 868/VI/2015

IV/JUNI 2015



DPR Sidak Pasar Induk Kramat Jati dan Pasar Modern BSD



DPR Sidak Pasar Induk Kramat Jati dan Pasar Modern BSD



Ketua DPR RI Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon saat mengunjungi Pasar Modern BSD

Menjelang bulan suci Ramadhan, Ketua DPR RI Setya Novanto didampingi Wakil Ketua DPR Fadli Zon, Anggota Komisi IV Firman Soebagyo, Robert Joppy Kardinal, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Suharso Monoarfa dan Dirjen Hortikultura Kementerian Pertanian Spudnik Sujono melakukan sidak ke Pasar Induk

Kramat Jati dan Pasar Modern BSD.

Ketua DPR beserta rombongan setibanya di Pasar Induk Kramat Jati dan Pasar Modern BSD langsung berinteraksi dengan para pedagang dan pembeli untuk mengetahui harga dan ketersediaan bahan pokok menjelang Ramadhan.

Menurut Novanto, harga sejumlah

bahan pokok seperti bawang, cabai, dan sayur-sayuran relatif masih stabil. "Sidak hari ini saya merasa puas karena ternyata harga-harga barang terkontrol. Ada sedikit kenaikan namun tidak begitu signifikan," ujar Setya Novanto.

"Kenaikannya tidak begitu besar, hanya berkisar tiga persen hingga lima persen. Tidak terjadi lonjakan yang signifikan," ungkap Setya Novanto.

Perbedaan harga di Pasar BSD dan Pasar Induk Kramat Jati, menurut Novanto disebabkan biaya tambahan yang ditanggung pedagang, seperti biaya transportasi serta biaya sewa ruko di Pasar BSD.

"Kalaupun ada kenaikan di pasar BSD itu wajar. Kalau di pasar induk kan harga langsung dari petani, sedangkan kalau disini (pasar BSD) harga sudah termasuk biaya transportasi," ujarnya.

Ia pun meminta pemerintah agar menjaga ketersediaan bahan pokok. "Kami meminta kepada pemerintah agar stok selalu tersedia tidak hanya untuk bulan puasa hingga lebaran, tetapi untuk tiga bulan ke depan," tegas Setya Novanto. (skr) foto: iwan armanias/parle/hr

DPR dan TETO Bahas Investasi

Wakil Ketua DPR RI Bidang Korinbang Agus Hermanto menerima kunjungan Delegasi Perwakilan *Taiwan Economic Trade Office* (TETO) di Indonesia Liang Jen Chang, Rabu (17/6). Dalam pertemuan tersebut salah satu topik yang dibicarakan yakni terkait neraca perdagangan kedua negara serta investasi keduanya.

Agus menyampaikan, hubungan antara Indonesia dan Taiwan secara resmi atau diplomatik bahwa Indonesia belum memiliki kantor perwakilan atau Kedutaan Besar di Taiwan seperti negara-negara lainnya, namun hanya terdapat perwakilan dagang di Taiwan maupun di Indonesia. *Taiwan Economic Trade Office* (TETO) merupakan perwakilan dagang Taiwan yang berada di Indonesia.

"Hubungan antara Indonesia dengan Taiwan sekarang ini semakin baik terutama dalam neraca perdagangan, dimana neraca perdagangan Indonesia cukup tinggi dan meningkat terus," kata Agus.

Indonesia adalah mitra dagang urutan ke sebelas terbesar Taiwan, sumber impor urutan ke sembilan terbesar dan pasar ekspor urutan ke 14 terbesar.

"Tenaga kerja Indonesia di Taiwan mencapai 240 ribu, berarti cukup banyak dan ini memerlukan perhatian kita bersama," imbuhnya.

Ekspor utama Taiwan adalah produk minyak, elektronik, logam, tekstil, pakaian, suku cadang mesin, peralatan mesin, suku cadang kendaraan bermotor dan produk lainnya.



Sedangkan impor utama adalah minyak, batubara, paduan tembaga dan emas, kayu dan karet serta bahan baku lainnya. Perusahaan minyak negara Taiwan CNPC dan Indonesia telah menandatangani kontrak jangka panjang untuk pengadaan gas alam.

Sementara produk-produk yang di ekspor Indonesia ke Taiwan yaitu *furniture*, kopi, *lifestyle*, *fashion*, dan *consumer product*, seperti mie instan, sambal, kecap. Selain produk non-minyak dan gas (migas), produk migas asal Indonesia masih menjadi yang terbesar diekspor ke Taiwan seperti batubara dan gas.

Hubungan dagang yang baik antara Indonesia dan Taiwan juga diharapkan mampu mendorong investasi perusahaan di negara tersebut ke Indonesia. Bahkan menurut Agus, saat ini Indonesia menjadi alternatif investasi nomor satu bagi perusahaan-perusahaan Taiwan yang ingin melakukan relokasi atau ekspansi.

Dalam kesempatan tersebut, Agus mengharapkan neraca perdagangan yang bagus antara Indonesia dan Taiwan, kerjasama keduanya bisa terus ditingkatkan. Namun dia mem-



Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto menerima kunjungan Delegasi Perwakilan Taiwan Economic Trade Office (TETO)

persoalkan tidak adanya perwakilan diplomatik Indonesia di Taiwan, apakah hal tersebut tidak menjadi kendala dalam peningkatan kerja sama. (skr) Foto: Iwan Armanias/parle/od

DPR Dukung Misi Kemanusiaan Peduli Suriah



Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menerima Delegasi FIPS

Wakil Ketua DPR RI Koordinator bidang Politik dan Keamanan Fadli Zon mendukung misi kemanusiaan yang dijalankan Forum Indonesia Peduli Syam (FIPS) terhadap warga Suriah dengan cara penyerahan donasi atau bantuan dari masyarakat Indonesia. Hal tersebut diungkapkannya saat menerima delegasi FIPS, Rabu (17/6) di ruang kerjanya, Senayan Jakarta.

“Saya mendukung misi kemanusiaan yang dilakukan FIPS kepada pengungsi Suriah yang berada di Turki, sebagai sesama umat muslim memang kewajiban kita untuk saling membantu. Namun, sebagai evaluasi ke depan, hal-hal yang menyangkut administrasi atau dokumen pendukung harus terus diperkuat. Agar tujuan mulia itu bisa terlaksana dengan baik, dan kejadian

penangkapan oleh tentara Turki tidak terjadi lagi,” ujar Fadli Zon saat pertemuan tersebut.

Fadli menjelaskan sebagai umat muslim, memang diwajibkan untuk saling membantu. Terlebih lagi pengungsi Suriah yang berada di Turki yang jumlahnya lebih dari dua juta jiwa itu kondisinya cukup memprihatinkan, kurang makan, dan pakaian yang ala kadarnya.

Namun misi sosial tersebut sempat menimbulkan kendala tatkala Turki secara tiba-tiba menangkap delegasi FIPS, dengan tuduhan ISIS (*Islamic State of Iraq and Syria*). Sekjen FIPS, Abu Harits mengatakan, Turki tidak hanya menangkap, namun juga mengambil dokumen-dokumen berupa foto dan rekaman mereka saat menyerahkan donasi dan berinteraksi dengan warga Suriah. Oleh karena itu melalui DPR RI, FIPS berharap agar Turki mengembalikan dokumen-dokumen yang diambil dan dirampasnya.

“Kebetulan kami (DPR RI) memiliki GKSB (Grup Kerja Sama Bilateral) dengan Parlemen Turki. Kami akan mencoba membicarakan hal ini. Karena tujuan FIPS ini semata merupakan misi sosial, penyerahan donasi dari masyarakat Indonesia kepada warga Suriah di Turki yang bernasib kurang beruntung,” pungkasnya. (Ayu)/foto: andri/parle/hr

DPR Mudahkan Akses Layani Masyarakat



Ketua DPR RI Setya Novanto membuka Ruang Pelayanan Terpadu Pengaduan Masyarakat dan Informasi Publik

Ketua DPR RI secara resmi membuka Ruang Pelayanan Terpadu Pengaduan Masyarakat dan Informasi Publik (RPTPMIP), Rabu (17/6). Hal ini ditujukan dalam rangka peningkatan pelayanan DPR kepada masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi (pengaduan) dan pelayanan informasi publik.

Dengan adanya Ruang Pelayanan Terpadu Pengaduan Masyarakat dan Informasi Publik ini, selain akan memudahkan akses, juga diharapkan dapat membuat masyarakat merasa aman

dan nyaman ketika akan menyampaikan aspirasi, pengaduan dan mencari informasi publik yang dibutuhkan. Hingga kemudian tercipta sebuah komunikasi yang positif dan sinergi yang baik antara masyarakat luas dan para wakilnya di lembaga legislatif ini.

Sejatinya selama ini pun DPR telah membuka akses pada masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan pengaduannya kepada DPR. Diantaranya lewat audiensi dengan Pimpinan Dewan, Pimpinan Komisi (AKD), Pimpina-

nan Fraksi. Di samping itu, juga ingin menghadiri atau mengikuti jalannya Rapat Paripurna DPR dan rapat-rapat komisi. Disini delegasi masyarakat akan dilayani oleh Bagian Humas yang kemudian disalurkan sesuai keinginan delegasi.

Masyarakat baik per orang atau kelompok juga dapat menyampaikan aspirasi dan pengaduan secara tertulis kepada Dewan yang akan dilayani di Ruang Pelayanan Terpadu ini, dan selanjutnya pengaduan tersebut akan diproses (dianalisis) oleh Bagian Pengaduan Masyarakat, untuk kemudian disampaikan kepada Pimpinan DPR atau Pimpinan Komisi untuk segera ditindaklanjuti.

Sebagai salah satu wujud dari Parlemen Modern yang sarat akan penggunaan teknologi informasi, maka DPR juga membuka akses pengaduan masyarakat secara online melalui website dpr <https://pengaduan@dpr.go.id> atau SMS ke nomor: 08119443344. Serta Pelayanan informasi publik melalui : <https://ppid.dpr.go.id>

Dengan dibukanya Ruang Pelayanan Terpadu Pengaduan Masyarakat dan Informasi Publik secara resmi ini, diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal kepada masyarakat luas untuk menyampaikan aspirasi dan pengaduannya. Pada akhirnya, DPR berharap agar ruang yang berada di Lobby Gedung Nusantara III Senayan Jakarta ini dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat secara optimal, sehingga kebutuhan masyarakat dapat terlayani dengan baik. (ayu)/foto: iwan armanias/parle/iw.

DPR Apresiasi Pemerintah Jaga Pasokan dan Harga Sembako

Ketua DPR RI Setya Novanto mengapresiasi langkah taktis yang dilakukan pemerintah untuk menjaga pasokan dan mengendalikan harga sembako di pasaran sehingga situasi tetap terkendali.

Demikian disampaikan Ketua DPR saat sidak ke Pasar Induk Kramat Jati dan Pasar Modern BSD Serpong, Selasa (16/6) didampingi Wakil Ketua DPR Fadli Zon, Anggota Komisi IV Firman Soebagyo, Robert Joppy Kardinal, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Suharso dan Dirjen Hortikultura Kementerian Pertanian Spudnik Sujono. Sidak di kedua pasar ini untuk memantau harga-harga kebutuhan pokok menjelang Ramadhan 1436 H.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPR menyampaikan

rasa puasny atas informasi yang didapat langsung di lapangan dari para pedagang maupun pembeli atas terkontrolnya harga-harga kebutuhan pokok.

Novanto meminta agar pemerintah tetap mengendalikan dan mengontrol harga-harga kebutuhan pokok, jangan sampai ada permainan para spekulan. "Selama ini masyarakat dibuat resah dengan adanya kenaikan beberapa kebutuhan pokok di berbagai daerah," ungkapnya.

Dia juga berharap masyarakat tidak khawatir dalam menghadapi puasa maupun lebaran terkait harga-harga kebutuhan pokok, karena pasti pemerintah akan mengontrol harga-harga tersebut.

"Kami akan terus berkoordinasi dengan pemerintah agar

jangan sampai stok menipis dan harga-harga tetap stabil, jangan hanya sampai puasa dan lebaran namun hingga tiga bulan ke depan,” terang Novanto.

Dalam sidak di Pasar Induk Kramat Jati, para pedagang meminta pemerintah untuk mengendalikan semua harga kebutuhan pokok. Walaupun ada kenaikan beberapa kebutuhan pokok, namun masih cenderung stabil dan terkendali.

Novanto meminta pedagang untuk tidak menaikkan harga-harga kebutuhan pokok pada saat puasa dan lebaran dimana permintaan pada saat itu akan naik tajam. “Saya pesan ke pedagang ini harga jangan dinaik-naikkan ya pak. Kasihan pembeli, semua harga sedang naik,” kata Novanto.

Sementara itu, untuk melindungi dan memberdayakan para petani lokal, Novanto menghimbau masyarakat maupun supermarket terus menggunakan dan membeli produk lokal karena kualitasnya justru lebih bagus daripada produk-produk impor. “Kalau bisa pakai produk lokal. Beli jeruk, semangka, dan buah-buahan dari produk lokal,” terang Novanto.

Ia mencontohkan produk kentang yang ada di Pasar Induk Kramat Jati, harganya sangat murah sehingga bisa merugikan dan mematikan petani lokal. Dia juga meminta pemerintah harus serius menyelesaikan persoalan tersebut agar petani lokal juga tidak dirugikan.

Dalam pantauan di Pasar Induk Kramat Jati, harga bawang merah dan cabai justru mengalami penurunan. Dimana harga bawang merah turun dari Rp26.000,00 menjadi Rp24.000,00 per kg. sedangkan harga cabai turun dari Rp40.000,00 menjadi Rp24.000,00 per kg. Dari keterangan para pedagang di Pasar Induk Kramat Jati bahwa penurunan tersebut akibat pasokan barang di pasar tersebut lancar dan justru kenaikan itu disebabkan pasokan dari para petani lambat.

“Ini kebetulan juga ada Pak Suharso Manoarfa selaku Wantimpres (Dewan Pertimbangan Presiden), saya mau meminta agar Presiden dan kementerian terkait untuk dapat menjaga kestabilan harga,” terang Novanto.

Novanto mengatakan, harga beberapa kebutuhan pokok memang mengalami kenaikan namun tidak signifikan antara tiga sampai lima persen. “Memang ada selisih harga antara di Pasar Modern BSD dengan Pasar Induk Kramat Jati, namun itu wajar karena ada biaya transportasi,” ujarnya.



Ketua DPR RI Setya Novanto saat diwawancara wartawan

Disela-sela sidak tersebut Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyampaikan tanggapannya, pada prinsipnya, DPR meminta agar pemerintah menetapkan harga dasar eceran, jangan meliberalisasi perdagangan. Pemerintah harus melakukan intervensi jika ada gejolak harga, jangan hanya mengendalikan supply dan demand karena bisa merugikan pihak yang lemah. Dengan adanya harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah, maka konsumen tidak akan dipusingkan dengan kenaikan harga seperti menjelang bulan puasa saat ini”.

Hal senada juga disampaikan Ketua DPR bahwa pemerintah harus membuat batas maksimum dan minimum harga jual bahan-bahan pokok, agar semua pihak bisa mendapatkan keuntungan merata tanpa ada yang harus dirugikan.

Disisi lain Ketua DPR menghimbau kepada masyarakat agar lebih sabar dan jangan terpancing isu negatif tentang kenaikan harga yang tinggi menjelang Ramadan. Sebagai fungsi pengawasan DPR, Novanto menyampaikan, akan terus berkoordinasi dengan pemerintah agar terus menjaga kestabilan harga-harga kebutuhan pokok sehingga tidak terjadi lonjakan harga yang bisa membebani masyarakat.

Kesempatan sidak ke Pasar Induk Kramat Jati dan Pasar Modern BSD Serpong tidak dilewatkan Ketua DPR untuk membeli beberapa kebutuhan pokok seperti bawang merah, cabai, kol, dan blewah. *(skr, spy)/foto:iwan armanias/parle/iw.*

Fadli Zon Sampaikan Pertanggungjawaban Kunker

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Kunjungan Kerja (Kunker) ke India, 10-13 Juni 2015. Kegiatan bersama anggota Komisi III Dwi Ria Latifa (FPDIP) dan anggota Komisi I Ahmad Muzani (FP Gerindra) itu menghasilkan kesepahaman dan pengetahuan yang lebih baik tentang kemajuan negara demokrasi terbesar kedua di dunia tersebut.

“Saya menyampaikan laporan kunker

ke India ini kepada publik melalui rekan-rekan media sebagai bentuk pertanggungjawaban. Banyak hal yang bisa dipelajari dari India salah satu yang paling penting adalah negara dengan penduduk 1,3 miliar ini ternyata sudah berswasembada, tidak ada impor beras dan gandum, bahkan berhasil ekspor,” kata dia dalam konferensi pers di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (15/6).

Delegasi DPR menurutnya bertemu



Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon



Direktur Eksekutif *Food Corporation of India (FCI)*, S.P. Kar yang menjalankan tugas penting memberikan dukungan harga untuk melindungi kepentingan petani, menjaga stabilitas operasional dan cadangan logistik/pangan untuk ketahanan pangan nasional, mendistribusikan pangan ke seluruh wilayah serta menginventarisasi pasar guna menciptakan stabilitas harga.

Wakil Ketua DPR bidang Korpolkam ini menggarisbawahi 95 persen distribusi pangan dilakukan dengan kereta api selebihnya menggunakan angkutan sungai/laut. “FCI memberikan subsidi kepada para petani antara lain listrik, air, pupuk, pinjaman bunga rendah dan jaminan gagal panen. Ini yang benar-benar harus dipelajari pemerin-

tah kita, termasuk Bulog,” tandasnya.

Dalam pertemuan dengan Komisi Pemilu India (KPI), ia menyampaikan apresiasi kepada institusi yang telah berdiri sejak 25 Januari 1950 karena berhasil menjaga independensi serta dihormati semua pihak. KPI berhasil menciptakan *Electronic Vote Machine (EVM)* sebagai pengganti kotak suara sejak tahun 2004.

Dengan EVM pemilih tidak menconteng atau mencoblos tapi cukup memencet tombol pilihan. EVM bukan komputer atau jaringan internet tetapi berfungsi seperti kalkulator yang langsung bisa menghitung. Itulah sebabnya hasil pemilu secara nasional bisa langsung diketahui dalam waktu 48 jam. “Jadi tidak bisa diretas, ini buatan

dalam negeri India dan mampu bertahan selama lima belas tahun,” jelasnya.

Politisi dari Fraksi Partai Gerindra ini juga berkesempatan mengunjungi Brahmos Aerospace yang terkenal dengan produksi rudal jelajah supersonic ‘Brahmos’ kerja sama India dengan Rusia. Rudal ini memiliki jangkauan 290 km dengan tingkat kecepatan dan ketepatan melebihi rudal Tomahawk.

“Kita patut mempertimbangkan kerja sama dalam pengembangan rudal kita yang baru mencapai 60 km. Sistem kerja sama dengan skema *sharing* 50,5 persen India dan 49,5 persen Rusia dalam bentuk dana dan teknologi menurut saya bisa menjadi rujukan,” demikian Fadli. (iky) foto: *denus/parle/hr*

Parlemen India Juga Kesulitan Capai Target Legislasi



Gedung Parlemen India

Dalam kunjungan ke Parlemen India 10-13 Juni 2015, delegasi Parlemen Indonesia yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mendapat masukan tentang kesulitan menyelesaikan target legislasi. Parlemen dari negara demokrasi terbesar kedua di dunia ini hanya mampu menuntaskan rata-rata 20 persen undang-undang dari target

prolegnasnya.

“Kita mendapat penjelasan Parlemen India juga kesulitan menuntaskan target legislasi, hanya 20 persen yang selesai menjadi UU. Saya rasa itu hampir terjadi di banyak parlemen di dunia, karena perdebatan dan perbedaan yang terjadi dalam pembahasan,” kata Fadli dalam konferensi pers di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (15/6/15).

Ia menyebut dalam kunjungan ke Parliament House India, Delegasi Indonesia diterima oleh Menteri Parlemen India, Veincaiah Naidu. Dalam kesempatan tersebut upaya DPR untuk membentuk *Asia-African Parliamentary Group* mendapat dukungan.

Pada bagian lain Wakil Ketua DPR bidang Korpolkam ini menekankan walaupun menghadapi sejumlah tantangan dalam penuntasan target Prolegnas, upaya optimal terus dilakukan. DPR menurutnya telah menetapkan

dua hari dalam seminggu yaitu Rabu dan Kamis sebagai hari legislasi.

“Kita sepakat Rabu dan Kamis sebagai hari legislasi, kita sepakat dalam masa reses anggota Baleg bisa tetap bersidang untuk mempercepat proses legislasi. Kita juga sedang mengkaji bagaimana bisa mengurangi masa reses,” tutur dia.

Fadli juga menyebut dari 27 RUU usul inisiatif DPR dalam Prolegnas Prioritas tahun ini semua naskah akademis sudah selesai, kecuali satu yang masih tertunda. Sementara 10 RUU yang menjadi usulan pemerintah baru tiga naskah akademik yang diterima DPR.

“Kita berupaya optimal dalam menuntaskan naskah akademik ini termasuk menghimpun masukan dari publik salah satunya melibatkan para akademisi dari sejumlah perguruan tinggi di tanah air,” tuntas dia. (iky)

foto: *doc/parle/hr*

Ironis, Lampung Penghasil Gula Kedua Terbesar Tapi Impor Raw Sugar

Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR Dodi Reza Alex Noerdin mengemukakan, Propinsi Lampung telah menjadi penghasil gula terbesar di Sumatera dan terbesar kedua tingkat nasional setelah Jatim. Kedua Propinsi

tersebut telah menyumbang 72% total produk gula nasional.

“Tapi ironis, sebagai salah satu produsen gula terbesar yang memiliki perkebunan dan pabrik gula (PG), Lampung masih mengimpor gula mentah (*raw sugar*) dari luar negeri,”



Tim Kunspek Komisi VI DPR saat mengunjungi pabrik gula Sugar Labinta, Lampung

ujar Dodi saat melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan jajaran Pemprop. Lampung diwakili Sekretaris Pemprop Arinal Djunaedi, Kepala Dinas terkait dan Direksi PTPN 7, PT Sugar Labinta dan PT Adi Karya Gemilang, Senin (15/6).

Menurut Pimpinan Komisi VI dari FPG ini, hingga semester I/2014 telah mengimpor 19,1% dari total non migas. Kondisi ini menunjukkan bahwa areal perkebunan tebu di Lampung seluas 113 ribu ha patut dipertanyakan mengapa belum bisa memenuhi kebutuhan gula dalam negeri sehingga masih perlu impor untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

“Gula merupakan komoditas penting, sehingga kenaikan harga eceran di tingkat konsumen dapat memicu kenaikan inflasi dan memunculkan keresauan industri gula lokal sebagai akibat banjir gula rafinasi,” ungkap Dodi.

Dalam kaitan ini Komisi VI mengapresiasi kebijakan Pemprop Lampung yang menerbitkan Pergub No.59 tentang pengendalian produk impor. Langkah ini sebagai inisiatif

untuk mengendalikan impor terutama komoditas strategis termasuk gula dan pada gilirannya akan melindungi petani tebu dan memberi kesempatan petani untuk mengembangkan produksinya.

Sekretaris Pemprop. Lampung Arinal Djunaedi mengharapkan kalau industri gula mau melaksanakan UU 39/2014 maka hentikan impor *raw sugar* pada April-hingga Oktober sebab merupakan masa panen raya petani tebu. Selanjutnya diberi kesempatan impor pada Desember-April itupun tidak boleh lebih dari 800 ribu ton. “Impor dilakukan kalau kekurangan dan tidak mengganggu konsumsi. Dan untuk melindungi petani maka perlu diterapkan tarif impor, sehingga rakyat tidak dirugikan,” jelasnya.

Pada tahun 2014 lalu luas areal perkebunan tebu di wilayah tersebut tercatat 113.000 ha menghasilkan gula sebanyak 37% dari kebutuhan gula nasional. Komoditas lain seperti padi, jagung, nanas, dan kopi robusta juga berproduksi cukup besar memiliki andil besar dalam produksi nasional.

Dodi Reza menambahkan, masukan dari berbagai pihak baik Pemprop, BUMN Perkebunan maupun pelaku usaha perkebunan akan dibawa dalam rapat dengan pemerintah baik Menteri Perindustrian, Perdagangan maupun BKPM. “Masukan dari Pemprop sangat baik dan jelas, karena itu Komisi VI tidak akan mendlolimi rakyat dan akan menindaklanjuti. Sepanjang tidak melanggar UU maka akan bisa menjadi pedoman dalam menjalankan industri gula berbasis tebu,” tegasnya.

Tim Kunker Spesifik Komisi VI dipimpin Dodi Reza Alex Noerdin (FPG) didampingi Insan Yunus (FPDIP), Dwie Aroem Hadiatie (FPG), Melani Leimena Suharli (FPD), Siti Mukaromah (FKB), Tifatul Sembiring (FPKS dan Nyat Kadir (F-Nasdem). (mp) foto: mastur prantonopar/le/hr

Aturan Adopsi Anak Belum Tersosialisasi dengan Baik

Peraturan tentang adopsi anak di Indonesia secara khusus diatur dalam PP No. 54 tahun 2007. PP ini adalah petunjuk teknis terhadap UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sayangnya menurut Ketua Komisi VIII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay selama ini aturan yang dijadikan sebagai payung hukum dalam proses pengangkatan anak di Indonesia itu belum tersosialisasi secara luas.

Saleh menjelaskan, sejatinya dalam PP No. 54 ini secara tegas telah merinci tentang berbagai hal termasuk di antaranya tentang tata cara pengangkatan anak, syarat-syarat orang yang boleh mengangkat anak, ketentuan tentang usia anak yang boleh diadopsi, kewa-

jiban orang tua angkat, pengawasan baik oleh pemerintah maupun masyarakat, dan berbagai aturan lainnya.

Dengan begitu, para calon orang tua angkat memahami betul seluruh konsekuensi hukum pengangkatan anak. Tidak ada alasan yang bisa diterima jika di kemudian hari anak mendapat kekerasan, ditelantarkan, dan disiasikan. Namun semua itu belum tersosialisasi dengan baik. Hal itu terbukti, dari banyaknya kasus pengadopsian anak yang tidak melalui prosedur sebagaimana yang tercantum PP tersebut.

Politisi Fraksi PAN ini berkaca pada kasus Angeline yang menurut informasi dari Mensos, proses adopsi Angeline tidak terdaftar di Kemensos. Padahal,



Ketua Komisi VIII DPR Saleh Partaonan Daulay

pengadopsian anak semestinya dicatatkan melalui kantor catatan sipil setelah mendapatkan izin pengadilan untuk mengadopsi. Semua proses tersebut semestinya diawasi secara langsung oleh Kemensos, khususnya Direktorat Rehabilitasi Sosial.

“Hal yang mungkin tidak termaktub di dalam PP itu menurutnya adalah



tentang sanksi terhadap penelantaran anak yang dilakukan secara sengaja oleh orang tua angkat. Namun sebenarnya, aturan itu sudah ada dalam ketentuan lain di dalam UU No. 23 tentang Perlindungan Anak. Semestinya, semua aturan itu sudah dimengerti dan dipahami oleh seluruh orang tua angkat,” ungkapnya.

Ditambahkan Saleh, sering kali satu keluarga yang tidak mampu, menyerahkan anaknya begitu saja kepada

keluarga mampu yang berminat mengadopsi. Karena dilihat baik dan memiliki komitmen kuat untuk mengasuh anak, mereka merelakan begitu saja anaknya untuk diadopsi. Dalam perjalanannya tidak semua kasus adopsi anak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Di sinilah perlu melibatkan negara untuk ikut mengawasi secara aktif.

Bahkan dalam PP 54 ini secara eksplisit menyebutkan agar warga masyarakat melaporkan kasus-kasus

kekerasan pada anak angkat kepada aparat terkait. Termasuk dalam hal ini, dilaporkan kepada pihak kepolisian. Oleh karena itu, Saleh menilai aturan yang ada sudah baik, namun implementasinya belum maksimal seperti yang diharapkan.

“Pemerintah masih perlu melakukan banyak hal agar UU dan PP tersebut bisa dilaksanakan dengan baik,” tegasnya. (Ayu) Foto: iwan armanias/parle/od

Kedaulatan Garam Penting Diwujudkan

Sebagai negara maritim dan memiliki garis pantai yang panjang, Indonesia sangat mungkin mewujudkan kedaulatan garam untuk kebutuhan industri dan konsumsi. Akses teknologi dan lahan menjadi kebutuhan mendasak untuk meningkatkan kapasitas produksi garam nasional.

Anggota Komisi VI DPR RI M. Nasim Khan (dapil Jatim III), mengharapkan ada pencaanangan kedaulatan garam di Tanah Air, tanpa bergantung lagi pada impor. Untuk itu, perlu ada pembenahan di PT. Garam, BUMN yang selama ini memproduksi garam nasional. Komisi VI sendiri sudah menyetujui pengucuran PMN bagi PT. Garam sebesar Rp300 miliar untuk pembenahan kinerja PT. Garam.

“Kita ingin ada kedaulatan garam di Indonesia, karena garam sangat dibutuhkan masyarakat. Maka kita menyetujui PMN tersebut. Ke depan kita akan kontrol supaya produksi garam bisa maksimal dan tidak impor

terus,” tandas Nasim, usai meninjau PT. Garam di Sampang, Madura, Selasa (16/6).

Politisi PKB ini mengungkapkan, setidaknya ada tiga problem yang harus segera dibenahi PT. Garam. Pertama, soal lahan yang masih kekurangan. Padahal, lahan sangat penting untuk pengembangan usaha. Di sinilah, kata Nasim, butuh komunikasi sinergis dengan petani dan Pemda setempat. Ke dua, sistem marketing yang harus optimal. Dan ke tiga, lanjut Nasim, kontrol ke internal PT. Garam sendiri.

Ditambahkan Nasim, kontrol produk juga perlu dilakukan agar kualitas garam semakin meningkat. Dengan begitu, kita bisa ekspor garam dengan kualitas terbaik. Dibutuhkan pemberdayaan semua lini untuk pembenahan PT. Garam. “Kita sangat kaya. Kapasitas juga cukup. Hanya kualitas yang perlu dimaksimalkan. Di era Pak Usman (Dirut PT. Garam yang baru) kita harapkan bisa maksimal. Kantor, gu-



Anggota Komisi VI DPR M. Nasim Khan

dang, dan pabrik harus diperhatikan,” serunya.

Ketika dimintai komentarnya soal rencana pembangunan pabrik baru oleh PT. Garam, Nasim menyambut baik dan mendukung upaya tersebut. Tujuannya tentu untuk meningkatkan kapasitas produksi garam. “Kalau pabriknya bagus, maka garam tidak terancam kehujanan yang akan merusak mutunya. “Kita dukung asal ke depan betul-betul maksimal. Jangan hanya buang-buang uang dan tak menghasilkan manfaat,” tutupnya. (mh)/foto:husein/parle/iw.

Komisi III Dorong Penuntasan Kasus Pembalakan di Simtra

Komisi III DPR RI memberikan perhatian pada berlarutnya kasus perambahan hutan lindung register 3 dan 4 di Dusun Urung Dolok, Dusun Nagori Togur, Dusun Dolok Silau, Kabupaten Simalungun, Sumut. Tersangka perambah Jan Waner Saragih diduga mengerjakan lahan yang masuk ke dalam konsesi latihan tempur TNI AD (Simalungun Military Training Area - Simtra), hingga saat ini tidak memenuhi panggilan kepolisian.

“Dari pantauan DPR, penyidikan kasus itu terkesan mandeg. Itulah sebabnya kami datang ke Polda Sumatera Utara

ini untuk memberikan penguatan kepada penyidik Polri dan Kejati agar dapat menuntaskan kasus ini,” kata Ketua Ketua Tim Kunker Spesifik Komisi III DPR RI Trimedy Panjaitan dalam pertemuan di Aula Catur Prasetya Lantai IV Mapolda Sumut, Medan, Senin (15/6/15).

Politisi FPDIP yang juga Wakil Ketua III ini menyebut dalam kunker spesifik ini diharapkan sejumlah kendala yang dihadapi aparat penegak hukum dapat didalami. Pemahaman ini membantu komisi yang membidangi masalah hukum dan keamanan dalam mendorong penyelesaian kasus



Pertemuan Tim Komisi III DPR dengan Polda dan Kajati Sumut

pembalakan ini.

Hadir dalam pertemuan tersebut Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol. Eko Hadi Sutedjo bersama para pejabat utama Polda dan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumut, Muhammad Yusni beserta jajarannya.

Sementara itu, anggota Komisi III DPR RI Dapil Sumut III Junimart Girsang (F-PDIP) mempertanyakan informasi yang diperolehnya tentang keresahan warga di sekitar lokasi karena mendapat ancaman dari oknum tentara.

“Saya sudah langsung mendatangi lokasi. Disana tertulis larangan masuk, dengan alasan lokasi latihan tembak militer. Karena itu, kita mendesak Kapoldasu segera menuntaskan kasus itu dengan cepat, mengingat kasus itu telah lebih dari setahun bergulir,” tekannya.

Secara keseluruhan Komisi III DPR RI memberi apresiasi pada sejumlah langkah Polda dan Kajati Sumut dalam rangkaian upaya penyidikan yang telah dilakukan. Tim juga mendukung Polda Sumut yang akan segera mengkoordinasikan masalah ini dengan Pangdam I Bukit Barisan.

Terkait hambatan yang dialami penyidik Polri dalam menangani kasus ini akan dibahas dalam rapat kerja dengan Kapolri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti. Komisi III mempertimbangkan untuk membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk mengawal penuntasan kasus yang melibatkan sejumlah instansi yaitu Polri, TNI dan Kementerian Kehutanan ini. (ray/iky) foto: rizka/parle/hr

Komisi XI DPR Apresiasi Pertumbuhan Ekonomi Jateng

Anggota Komisi XI DPR Hendrawan Supratikno mengapresiasi positif pertumbuhan kinerja ekonomi di Jawa Tengah. Pasalnya, Perekonomian Jawa Tengah diperkirakan akan tumbuh meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan besaran 5.5 sampai 5.9 persen.

Dari sisi domestik, investasi dan konsumsi baik swasta maupun pemerintah diperkirakan lebih tinggi dibandingkan tahun 2014, namun demikian, ekspor luar negeri diperkirakan belum membaik seiring dengan masih melambatnya perekonomian negara tujuan ekspor.

“Kalau dibuat karakterisasi di Jawa Tengah, karakternya yaitu cenderung industri labor intensif, dan berfokus kepada tekstil, furniture, alas kaki,

elektronik. yang kedua kalau dibuat struktur piramida industri tengah relatif lebih kuat paramaternya,” jelas anggota Fraksi PDIP ini.

Menurutnya, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jateng ini sangat kuat infrastrukturnya, kalau Provinsi lain itu kebanyakan the follow middlenya yang hilang. “Labour intensif dan UMKM itu kuat, kalau provinsi lain itu the follow middle hilang. labour intensif dan UMKM itu intinya lebih meningkatkan daya tahan dan teruji,” paparnya.

Ekspor Jateng diperkirakan akan membaik di triwulan selanjutnya dengan diprediksi peningkatan pertumbuhan ekonomi negara tujuan ekspor khususnya Amerika Serikat. Amerika Serikat tercatat sebagai negara tujuan



Anggota Komisi XI DPR Hendrawan Supratikno

utama ekspor komoditas daerah dengan porsi 25 persen dari keseluruhan ekspor. (Sugeng) Foto: Sugeng/parle/od

SNI Harus Dioptimalkan

Pemerintah harus mengoptimalkan penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk meningkatkan daya saing produk dan pengamanan pasar domestik menjelang implementasi MEA - Masyarakat Ekonomi Asean 2015. Indonesia sebagai negara dengan

jumlah penduduk hampir seperempat miliar (terbesar keempat dunia) dengan PDB mencapai USD 868,3 milyar merupakan pasar potensial yang harus diamankan dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan nasional.

“Langkah kongkrit yang mesti di-

lakukan Kementerian Perindustrian, Perdagangan dengan memaksimalkan penerapan SNI secara wajib, baik untuk produk dalam negeri maupun impor. Hal itu dilakukan untuk memberikan perlindungan kepada produsen dan konsumen domestik,” kata Wakil Ketua Komisi VI DPR Heri Gunawan di Jakarta, Rabu (17/6/15).

Ia menambahkan seiring dengan



Wakil Ketua Komisi VI DPR Heri Gunawan

perkembangan industri nasional yang telah mampu memproduksi berbagai jenis produk untuk kebutuhan dalam dan luar negeri, maka penerapan SNI tersebut sangat relevan untuk meningkatkan mutu produk sehingga lebih memiliki daya saing.

Pemberlakuan SNI wajib tersebut tentunya harus didukung dengan prasarana teknis dan institusional seperti laboratorium uji produk yang memadai dan handal. Namun sayangnya lanjut Heri, pemerintah masih kekurangan laboratorium uji produk yang memadai dan handal dalam rangka menghadapi MEA 2015.

“Ini sangat memprihatinkan, kurangnya prasarana laboratorium uji produk bisa berpengaruh pada tidak efektifnya fungsi pengawasan peredaran produk terutama impor, akibatnya berbagai produk impor yang tidak

memenuhi standar dengan mudah masuk ke pasar dalam negeri dan mengancam kesehatan dan keselamatan konsumen,” papar dia.

Saat ini, Kementerian Perindustrian memiliki 23 balai penelitian yang kurang berfungsi dengan baik karena keterbatasan anggaran dan hanya memiliki 16 laboratorium pengujian resmi. Padahal, idealnya untuk 1 produk SNI wajib harus diuji di 5 laboratorium. Celaknya lagi, dari 16 laboratorium tersebut, tidak semuanya bisa memeriksa keseluruhan produk SNI wajib.

Sebagai contoh, kebakaran akibat kabel listrik yang tidak memenuhi standar, bangunan yang runtuh karena tidak didukung oleh besi baja yang berkualitas, mainan anak-anak dari Tiongkok yang mengganggu kesehatan, sampai yang terakhir adalah polemik beras plastik impor.

Politisi Fraksi Partai Gerindra mengemukakan, tidak heran jika angka Indeks Kepuasan Pelanggan (IHP) terhadap layanan standarisasi nasional belum mencapai target. Hal ini menjadi indikasi bahwa kualitas pelayanan standarisasi masih tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Penyebabnya selain karena faktor SDM yang minim, juga karena terbatasnya sarana dan prasarana teknis pengujian.

“Saya meminta Kementerian Perindustrian, kementerian Perdagangan, serta institusi terkait seperti BSN dan PT Sucofindo untuk meningkatkan koordinasi yang sinergis terkait penerapan standar dan penilaian kese-

suaian yang terintegrasi dan menyelaraskan. Dalam konteks itu, standarisasi dan penilaian kesesuaian harus memiliki fungsi startegis sebagai protektor kepentingan nasional dan pengamanan perdagangan,” ujar dia.

Heri meminta BSN dan PT Sucofindo untuk memaksimalkan penerapan standarisasi nasional sesuai PP No.102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional, untuk tujuan meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya baik untuk keselamatan, kesehatan maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup, membantu kelancaran perdagangan, dan mewujudkan persaingan usaha yang sehat dalam perdagangan.

Kementerian Perindustrian diharapkan dapat lebih berperan aktif untuk melindungi produksi demi kepentingan nasional, karena serapan anggaran pada Kementerian Perindustrian per April 2015 yang relatif masih rendah +/- 13,74%. Ditambah balai penelitian yang ada dibawah naungannya kurang tertangani dengan baik dan menjadi terbengkalai serta laboratorium uji produk yang sudah banyak yang rusak, usang, dan tidak memenuhi spesifikasi standar serta teknologi yang sudah tertinggal jauh.

“Menjadi tanda tanya besar dan pertanyaan menarik, bagaimana sebuah produk bisa dinyatakan lolos uji coba, padahal balai-balai yang ada di kementerian tidak layak uji,” demikian Heri. (Spy/iky)/foto: naefuroji/parle/hr

DPR Dorong Peningkatan Sarana Prasarana RS Pirngadi

Sarana prasarana Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pirngadi, Medan, Provinsi Sumatera Utara dinilai masih kurang lengkap. Bahkan, beberapa jenis alat medis dianggap sudah ketinggalan zaman, sehingga tidak dapat mengakomodir kebutuhan saat ini. Sarana prasarana diharapkan dapat segera dilengkapi dan ditambah jumlahnya.

Demikian salah satu permasalahan yang mengemuka saat Tim Kunjungan Spesifik Komisi IX DPR meninjau langsung RS Pirngadi, Senin (15/6). Dari temuan ini, Komisi IX mendorong agar permasalahan ini mendapat perhatian



Anggota Komisi IX DPR Okky Asokawati

dari Pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan.

“Dari sisi keinginan sekarang, sarana prasarana (sarpras) sudah cukup memadai. Tapi kalau keinginan agar RS menjadi lebih besar, tentu harus dibutuhkan dana dan perhatian yang lebih besar lagi,” jelas Wakil Ketua Komisi IX DPR Asman Abnur, yang sekaligus menjadi Ketua Tim Kunspek.

Selain sarpras, tambah Politisi F-PAN ini, agar pelayanan RS Pirngadi dapat memenuhi kebutuhan di wilayah Sumatera Utara dan sekitarnya, maka Sumber Daya Manusia juga harus ditingkatkan.

“Jumlah tenaga medis perlu kita tingkatkan, agar mencukupi. Bidang spesialis diperluas lagi hingga sub bidangnya. Sehingga nantinya, dapat mengimbangi sarprasnya. Akhirnya, kecepatan pelayanan kepada pasien juga akan semakin meningkat,” imbuh Asman.

Untuk itu, imbuhan Politisi asal Dapil Kepulauan Riau ini, diharapkan kebutuhan sarpras RS Pirngadi dapat dipenuhi pada tahun anggaran 2016. Apalagi, saat ini Komisi IX sedang membahas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2016, dalam hal ini adalah Kementerian Kesehatan, sebagai mitra kerjanya.

“Saat ini kami sedang membuat RKP 2016. Mudah-mudahan dapat kita masukan. Yang pasti, secara keseluruhan hasil kunjungan ini akan kami bahas

dengan Pemerintah,” janji Asman.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi IX DPR Zulfikar Achmad (F-PD) menilai, bangunan RS Pirngadi sudah tidak layak. Konstruksi bangunan model lama, dianggap kurang memadai untuk kebutuhan saat ini.

“Bangunannya untuk sekelas RS ketiga terbesar di Sumatera Utara, tapi masih kurang layak,” tukas Politisi asal Dapil Jambi ini.

Anggota Komisi IX DPR Ansory Siregar juga mendukung agar sarpras di RS Pirngadi dilengkapi dan ditambah. Politisi asal Dapil Sumut ini berjanji akan segera berkoordinasi dengan seluruh Anggota Komisi IX dan Pemerintah. “Saya juga mengingatkan, persediaan obat jangan sampai habis,” ingat Politisi F- PKS itu.

Sebelumnya, beberapa Kepala Staf Medik Fungsional (SMF) mengeluhkan sarpras yang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan saat ini. Salah satunya Dr Yasmin, Kepala SMF Radiologi mengatakan, beberapa alat di bagiannya sudah ketinggalan zaman, bahkan beberapa sudah tidak berfungsi lagi.

Kunspek ke Sumut ini juga diikuti diantaranya oleh Anggota Komisi IX DPR Ribka Tjiptaning, Daniel Lumban Tobing, Sarmuji, Khaidir, Putih Sari, Robert Rouw, Siti Mufattahah, dan Handayani.

Kemudian ikut serta Nihayatul Wafiroh, Siti Masripah, Hang Ali Saputra Syah Pahan, Muhammad Iqbal, Irgan Chairul Mahfisz, Okky Asokawati, dan Amelia Anggraini. (sf) Foto: Sofyan/parle/hr

Industri Garam di Sampang Sangat Prospektif

Industri garam nasional yang dikelola PT. Garam di Sampang, Madura, Jawa Timur, sangat prospektif. Untuk itu, perlu sinergi yang baik antara BUMN ini dengan Komisi VI DPR dan Pemda setempat.

Pandangan tersebut dikemukakan Anggota Komisi VI DPR RI Slamet Junaidi, Selasa. (16/6) di Sampang, Madura.

“Industri garam di Sampang sangat prospektif. Dengan PMN sebesar Rp300 miliar, mudah-mudahan PT. Garam bisa memaksimalkan produksinya dan bisa menjadi produsen garam nasional,” harap Junaidi.

Politisi Partai Nasdem ini mengungkapkan, banyak masalah krusial yang perlu segera dibenahi oleh PT. Garam untuk mengoptimalkan produksinya. Mesin produksi, misalnya, banyak yang sudah tak layak pakai. PT. Garam butuh akses teknologi mesin produksi yang lebih memadai.

“Yang paling utama, perlu dibangun pabrik baru di sini. Dan untuk memajukan perusahaan ini tergantung visi misi Dirutnya yang baru. Bila mereka tak berinisiatif membangun perusahaan ini dengan baik, selamanya akan seperti ini,” katanya usai mengikuti pertemuan di PT. Garam dalam rangkaian kunjungan kerja spesifik Komisi VI ke Jatim.

Sementara soal serapan garam rakyat, nilai Junaidi, belum sepenuhnya dilakukan PT. Garam. Harga garam rakyat



Anggota Komisi VI DPR Slamet Junaidi saat berdialog dengan Dirut PT. Garam

kualitas satu akan dibeli Rp750. Politisi dari dapil Jatim X ini, berharap saat PMN sudah berjalan di PT. Garam, serapan garam rakyat harus optimal. “Mari kita bersinergi. Kita bangun yang baik PT. Garam ini supaya menjadi perusahaan garam nasional yang besar,” tutup Junaidi. (mh) foto: husen/parle/hr

DPR Berhati-hati Tetapkan Pemekaran Daerah

Komisi II DPR RI akan berhati-hati dalam merespon rencana pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB), termasuk Kepulauan Gorom-Wakate di Kabu-

paten Seram Bagian Timur (SBT), Maluku. Salah persyaratan yang penting yang selalu menjadi perhatian adalah masalah tapal batas.

“Komisi II DPR RI tentu harus berhati-hati, agar tujuan pemekaran daerah baru bisa terwujud dengan baik,” kata Ketua Tim Kunjungan Spesifik Komisi II



Tim Kunspek Komisi II DPR saat pertemuan dengan Bupati Seram Bagian Timur, Maluku

Lukman Edy dalam pertemuan dengan jajaran Muspida di Pendopo Kabupaten SBT di Bula, Senin (15/6/15).

Ia menekankan pemekaran penting dilakukan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat namun tidak berarti semua usulan DOB akan disetujui. Bila tidak memenuhi persyaratan bisa dipastikan komisi yang membidangi masalah dalam negeri ini akan sulit menyetujuinya.

Untuk rencana pemekaran Kepulauan Gorom-Wakate sebagai DOB yang saat ini sedang diproses di DPRD Provinsi Maluku, Wakil Ketua Komisi II ini mengingatkan Pemkab SBT sebagai

kabupaten induk dan Pemprov Maluku perlu memenuhi berbagai persyaratan pemekaran.

Bicara pada kesempatan yang sama anggota Komisi II, Abdul Malik Hara-main menekankan pemekaran bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperpendek rentang kendali pelayanan. Seluruh proses harus dilakukan dengan cermat, sehingga tidak menimbulkan persoalan baru pasca pemekaran nanti.

Pemekaran menurut politisi FPKB ini harus melalui tahapan yang sistematis dalam pemenuhan syarat. Komisi II tekannya akan mengembalikan DOB

ke kabupaten induk, bila dinilai gagal dalam hal pembangunan. Hal ini sejalan dengan amanat undang-undang nomor 23 tahun 2014.

Terkait rencana pemekaran Kabupaten Kepulauan Gorom lanjutnya akan mendapat penilaian. Apabila semua syarat telah terpenuhi, Komisi II tidak akan berlama-lama untuk bersikap. “Kami tidak dapat memaksakan untuk menyetujui pemekaran. Jadi, tolong dipenuhi persyaratan kalau soal dukungan, gampang,” tekannya.

Bupati Kabupaten SBT Abdullah Vanath menjelaskan rencana pemekaran merupakan keinginan kuat pemerintah Kabupaten SBT dan didukung 90 persen masyarakat setempat. “Bagi kami hal ini urgen, itulah sebabnya kami berharap Komisi II dapat melihat secara langsung perkembangan pembangunan di Kabupaten SBT, dan persiapan pemekaran daerah otonom baru,” ujar dia.

Ketua Komisi A DPRD Provinsi Maluku Melkias Frans memaparkan DPRD Maluku dan Gubernur Maluku telah menyetujui dan mendukung 13 calon daerah otonom baru di Maluku untuk masa 10 tahun kedepan. Dalam waktu dekat, kami akan menyampaikan dokumen tentang rencana pemekaran tersebut tersebut ke Komisi II DPR RI,” katanya. (Andri)/foto:andri/parle/jw.

Komisi I Bahas Mekanisme UKK Calon Panglima TNI dan KaBIN

Komisi I DPR RI mulai bersiap menyongsong pelaksanaan uji kepatutan dan kelayakan (UKK) calon Panglima TNI dan Kepala BIN (Badan Intelijen Negara). Sejumlah ketentuan, prosedur dan mekanisme pelaksanaan UKK menjadi bahasan khusus dalam rapat pleno internal komisi yang membidangi masalah pertahanan, kominfo dan luar negeri ini.

“Iya kita hari ini sudah mulai mengadakan rapat internal untuk membahas prosedur dan mekanisme fit and proper test. Saya perkiraan 29 dan 30 Juni sudah bisa kita selesaikan,” kata Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (16/6/15).

Politisi Fraksi PKS ini memastikan proses pengujian, pemaparan visi dan



Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq

misih serta tanya jawab pendalaman terhadap dua kandidat yang telah diajukan presiden dilaksanakan pada waktu yang berbeda. Namun ia belum dapat menyampaikan siapa yang tampil perdana karena masih harus

disepakati dalam rapat internal komisi.

“Kita pastikan sebelum masa reses Komisi I sudah dapat menyampaikan laporan hasil akhir dari proses uji kepatutan dan kelayakan pada rapat paripurna DPR,” tutur wakil rakyat dari daerah pemilihan Jabar VIII ini.

Menjawab pertanyaan wartawan terkait kandidat KaBIN Letjen (Purn) Sutiyo yang menjabat Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, ia menekankan pentingnya netralitas sebagaimana diatur dalam UU no.17 tahun 2011 tentang Intelijen Negara.

“Amanat UU mengharuskan Kepala BIN bekerja secara netral. Kalau beliau mengundurkan diri dari partainya, ya itu bagus menurut saya,” demikian Mahfudz. (iky) foto: naefuroji/parle/hr



UU RTRI Perkuat TVRI Dan RRI



Anggota Komisi I DPR Arif Suditomo dalam acara Forum Legislasi

Melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Radio Televisi Republik Indonesia (RTRI), Anggota Komisi I DPR RI Gamari Sutrisno berharap kedua penyiaran publik tersebut kuat, mandiri, mampu mengawal Pancasila, UUD NKRI 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI serta menjadi referensi nasional seperti penyiaran publik di negara maju lainnya.

“Saya berharap penggabungan RRI dan TVRI menjadi RTRI (Radio-Televisi Republik Indonesia) dapat menjadi kuat, mandiri, mengawal NKRI serta rujukan bagi media asing di Indonesia,” kata Gamari Sutrisno pada diskusi “Forum Legislasi: RUU RTRI”, hadir pula dalam diskusi Anggota Komisi I DPR RI F-Hanura Arif Suditomo, Direktur LPP RRI Niken Widiastuti dan Ketua Kompetensi PWI Pusat Kamsul Hasan di Gedung DPR RI Jakarta, Selasa (16/6).

Gamari berpandangan, bahwa untuk efektifitas dan efisiensi RRI dan TVRI sebaiknya digabung menjadi satu penyiaran publik nasional dengan dikelola secara profesional dan di back up oleh dana yang memadai dan tanpa iklan, karena RRI dan TVRI ini bertujuan untuk mengawal persatuan dan kesatuan bangsa serta NKRI dan bukan untuk mencari keuntungan.

Gamari menegaskan, Pemerintah sudah seharusnya mendukung pembentukan RTRI dengan mengalokasikan anggaran yang memadai, agar orientasi RRI dan TVRI benar-benar terwujud sebagai penyiaran nasional yang menjadi kebanggaan bangsa.

Dengan anggaran yang memadai, kata dia, maka RTRI dapat memproduksi program acara yang berkualitas dan diminati masyarakat. “Program acara tersebut terutama yang berkonsentrasi pada informasi dan edukasi, maupun hiburan,” katanya.

Selain itu, dalam menghadapi serangan media asing, jelas politisi dari PKS ini, tergantung keberanian kepada pemerintah dalam merubah kebijakan untuk tidak terbuka kepada media asing.

Sementara itu, Arif Suditomo, menilai selama ini media melihat dan menjadikan rakyat sebagai konsumen dan bukan sebagai warga negara, sehingga merugikan bangsa ini.

“Itulah yang akan kita perjuangkan agar RRI dan TVRI menjadi referensi informasi nasional. Sehingga untuk mencari informasi penting negara, bukan melalui TV swasta. Seperti BBC, di mana rakyat Inggris bangga dan rela membayar cukup mahal demi kemajuan BBC itu sendiri. Bahkan keluarga kerajaan mendahulukan BBC dibanding TV yang lain untuk hanya menggelar konferensi pers,” ungkapnya.

Selama ini diakui Arif Suditomo, terjadi ketidakseimbangan antara TVRI dan TV swasta, sehingga TVRI tidak menjadi TV publik yang kuat. “Karena itu dibutuhkan gerakan sosial dan gerakan politik agar TVRI menjadi penyiaran publik yang kuat dan menjadi referensi nasional,” tegas Politis dari Hanura ini.

Menurut Direktur LPP RRI Niken Widiastuti, dirinya menyambut positif rencana penggabungan kedua lembaga penyiaran negeri itu, dan ia berharap nantinya RRI dan TVRI menjadi lembaga penyiaran yang jelas dalam anggarannya. Untuk RRI sendiri kata Niken, sudah memiliki 88 stasiun siaran di seluruh Indonesia dan sejak awal bertujuan untuk mengawal NKRI. Bahkan sudah kerjasama dengan negara lain yang di negara tersebut terdapat WNI.

Menurut Kamsul terjadinya ketidakseimbangan antara TVRI dan RRI dengan TV swasta tersebut akibat tidak adanya penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh TV swasta belakangan ini. “Banyak kasus pelanggaran, tapi yang ditindak hanya pemegang izin siaran, bukan artis, aktor, penghibur dan sebagainya karena mereka ini tidak menjadi obyek hukum dalam UU Penyiaran. KPI pun sebatas memberi peringatan I,II dan III serta pemberhentian sementara dan pemberhentian tetap. Sanksi Rp 10 M untuk TV dan Rp 1 M untuk radio,” jelasnya. (nt/sc) Foto: Jaka Nugraha/parle/od

DPR Evaluasi Pemekaran Seram Bagian Timur

Dalam Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2014-2015, Komisi II DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Seram Bagian Timur, Provinis Maluku. Kunjungan ini dalam rangka melakukan evaluasi, kemajuan yang sudah dicapai dan hambatan-hambatan apa terkait otonom baru di Kabupaten ini.

Kunjungan spesifik ini dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPR Lukman Edy dan berlangsung selama tiga hari (14-16 Juni) serta diikuti 7 (tujuh) orang anggota Komisi II.

Lukman mengatakan, terkait pembentukan daerah otonom baru di Kabupaten Seram Bagian Timur ini, Komisi II akan melakukan evaluasi apa saja kemajuan yang sudah dicapai dan hambatan atau masalah apa yang dihadapi, khususnya dalam hal infrastruktur, pelayanan publik, sektor ekonomi masyarakat, Pendapatan Asli Daerah (PAD), aparat, serta pemindahan aset dan dokumen.

Hal-hal yang menjadi perhatian Tim Kunker Komisi II, terkait implementasi UU No. 23 Tahun 2014 tentang Peme-



Ketua Komisi A DPRD Provinsi Maluku menyerahkan usulan DOB ke Ketua Tim Kunspek Komisi II Lukman Edy

rintahan Daerah. Apakah sudah berjalan dengan baik dan kalau ada kendala harus dicarikan jalan keluarnya,” kata Lukman.

Tim juga akan menggali informasi mengenai kualitas pelayanan publik dan proses rekrutmen pegawai baik calon pegawai negeri sipil maupun honorer terkait program reformasi birokrasi di lingkungan Pemda provinsi maupun kabupaten/kota. Di samping itu, tim juga akan meminta keterangan soal penyelesaian sengketa masalah pertanahan dan masalah perbatasan dengan provinsi dan atau kabupaten tetangga.

Anggota tim Komisi II yang melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Seram Bagian Timur yaitu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI sekaligus Ketua Tim Kunker Spesifik F-PKB Lukman Edy, di dampingi Anggota F-PDI Perjuangan Komarudin Watubun, Diah Pitaloka, Anggota F-PG Tabrani Maamun, Anggota F-PKB Abdul malik Haramain, Anggota F- PKS Hadi Mulyadi, dan Anggota F-Nasdem Tamanuri.

Selain ke Provinsi Maluku, Komisi II DPR RI juga melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Barat dipimpin Ketua Komisi II, Rambe Kamarul Zaman dan Provinsi Sulawesi Tenggara dipimpin Wakil Ketua Komisi II Mustafa Kamal dan M Riza Patria. (and) Foto: Andri/parle/od

Butuh Sinergi BUMN dan Swasta untuk Swasembada Gula

Untuk mencapai target swasembada gula yang dicanangkan pemerintah, butuh sinergi yang kuat antara produsen gula, BUMN dan perusahaan gula swasta. Wakil ketua Komisi VI DPR Heri Gunawan menyatakan hal tersebut saat melakukan pertemuan dengan Direksi PT. RNI, PTPN XI, dan PTPN XII, Senin (15/6) di Malang, Jatim.

Menurut Heri, sinergi dengan swasta dibutuhkan, karena kinerja BUMN yang memproduksi gula sangat lemah. PT Rajawali 1 dan 2, anak perusahaan PT. RNI salah satu BUMN produsen gula sangat buruk kinerjanya. Bahkan, RNI sebagai induk perusahaan yang membawahi 12 perusahaan, terus merugi sejak tahun 2012. Dan tahun ini RNI mendapat PMN sebesar Rp3,1 triliun.

“Kami berharap BUMN ini dapat menghasilkan gula untuk kebutuhan rumah tangga. Pabrik gula yang dikelola BUMN sebetulnya bisa memenuhi semua ini,” ungkap Anggota F-Gerindra itu.

Sementara itu, pihak RNI sendiri mengakui, laporan keuangan RNI terus memburuk. Hingga 2014, RNI mengalami kerugian Rp301,7 miliar. Salah satu pemicu kerugian



Tim Kunspek Komisi VI DPR saat mengunjungi PT. RNI

RNI di bidang gula adalah anomali cuaca yang menurunkan produktivitas tebu sebagai bahan baku gula. (mh) foto: husen/parle/od

DPR Sukses Raih WTP Keenam dari BPK

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia kembali mendapatkan piagam penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Kementerian/Lembaga tahun 2014 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Penghargaan opini WTP beserta laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Kement-

terian/Lembaga tahun 2014 oleh BPK diterima langsung Sekretaris Jenderal DPR Winantuningtyastiti Swasanani di gedung BPK, Jakarta, Senin (15/6).

Adapun kriteria pemberian opini tersebut mencakup kriteria; 1. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP); 2. Kecukupan Pengungkapan (*Adequate Disclosures*);

3. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan; dan 4. Efektivitas Sistem Pengendalian Intern. Kriteria tersebut sesuai dengan UU No.15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Pada tahun 2015 ini, ada 38 Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang mendapatkan penghargaan atas laporan keuangan yang dilakukan BPK pada tahun 2014.

Sekjen DPR Winantuningtyastiti menyatakan penghargaan WTP ini merupakan yang keenam kalinya diterima



DPR. Win, begitu ia akrab disapa menyampaikan penghargaan ini bukan hanya sekedar penghargaan namun sebagai tantangan agar prestasi tersebut tidak turun dan sebagai pemicu untuk tetap dipertahankan pada tahun-tahun mendatang. Lebih jauh menurutnya penghargaan ini merupakan bentuk pengakuan bahwa DPR telah menyelenggarakan pengelolaan keuangan secara baik.

“Allhamdulillah untuk keenam kalinya DPR mendapatkan penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk laporan keuangan,” ungkap Win.

Setiap program yang disusun, tambah Win, harus dipertanggungjawabkan dengan baik dan tetap memperhatikan akuntabilitasnya. Sehingga, untuk tetap mempertahankannya, Win selalu memberikan pengarahan dan setiap bulannya melakukan konsolidasi mengenai laporan keuangan.

Adapun penghargaan yang diberikan BPK ada sebanyak 4 jenis opini penilaian yaitu; 1. Wajar Tanpa Pengecualian



Sekjen DPR RI Winantuningtyastiti menerima piagam penghargaan WTP dari BPK

(WTP); 2. Wajar Dengan Pengecualian (WDP); 3. Tidak Wajar (TW); dan 4. Tidak Menyatakan Pendapat (TMP). Untuk penilaian opini Wajar Tanpa Penge-

ualian (WTP) merupakan penilaian tertinggi yang diberikan BPK. (skr) Foto: Naefuroji/parle/od

Setjen DPR RI Gelar Sosialisasi Bagi Tenaga Ahli



Suasana sosialisasi bagi Tenaga Ahli Anggota DPR RI

Dalam rangka menciptakan transparansi yang menjadi salah satu karakteristik parlemen modern, maka Setjen (Sekertariat Jenderal) DPR RI menggelar sosialisasi tentang peraturan, dan mekanisme dari perjalanan dinas dalam dan luar negeri bagi Tenaga Ahli Anggota DPR RI.

“Setjen DPR menggelar sosialisasi peraturan, dan mekanisme dari perjalanan dinas dalam dan luar negeri bagi Tenaga Ahli Anggota DPR RI, tujuannya tidak lain untuk menciptakan transparansi yang menjadi salah satu karakteristik dari sebuah parlemen modern, selain teknologi informasi

dan penguatan fungsi representasi,” ujar Sekjen DPR RI, Winantuningtyastiti dalam sambutan pembukaan sosialisasi di Gedung DPR RI, Senayan, Senin (15/6).

Win mengatakan, tenaga ahli merupakan bagian dari pendukung kinerja dewan dalam menjalankan tiga fungsi utama kedewanan, yakni fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran, serta dua fungsi lainnya yakni fungsi representasi dan fungsi diplomasi parlemen.

Sesuai dengan AKUPA 2015 dan persetujuan APBN-P 2015, Tenaga Ahli dapat mendampingi anggota DPR untuk mengikuti perjalanan dinas tentunya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang sudah ditetapkan. Dengan demikian, semua proses dapat berjalan secara transparan, akuntabel dan sesuai tujuan. Karena itu, setelah perjalanan dinas tenaga ahli diharapkan dapat memberi laporan baik berupa laporan secara administrasi dan laporan pertanggungjawaban secara teknis.

Adapun peraturan yang mengatur tentang perjalanan dinas tersebut diantaranya Peraturan Menteri Keuangan No.113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap, serta Peraturan Menteri

Kuangan No.55 /PMK.05/2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan No.97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap, maka tenaga ahli yang dapat mendampingi perjal-

nan dinas anggota DPR, harus mengikuti berbagai ketentuan yang telah ditetapkan bersama.

Seperti adanya surat tugas harus menjadi satu dengan anggota DPR yang bersangkutan, Surat Perjalanan Dinas (SPD) harus distempel di daerah

tujuan, melampirkan bukti pembelian tiket, tiket asli, *boarding pass*, tiket kereta api/bus/kapal laut, serta melampirkan bukti pengeluaran riil taksi yang dibubuhi materai Rp 6.000. (Ayu) Foto: Jaka Nugraha/parle/od

TPID Dituntut Lebih Berperan Kendalikan Inflasi Daerah



Ketua Tim Kunspek Komisi XI DPR John E. Rizal berdialog dengan jajarannya BI Perwakilan Jateng

Ketua tim Kunker Spesifik Komisi XI DPR John E. Rizal mengharapkan peran Tim Pemantauan dan Pengendalian Infasi Daerah (TPID) dapat berperan aktif dan turun ke lapangan untuk mengerem laju inflasi pada bulan ramadhan ini.

“Kita sadari inflasi erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi. sementara dalam mengkondisikan inflasi terkesan bolanya ada di BI dengan segala keterbatasan. Kita tahu Inflasi dipengaruhi dengan banyak bahan pokok, karena itu TPID harus

berperan dalam melakukan intervensi pasar,” jelasnya saat Kunker ke Semarang, baru-baru ini.

Menurutnya, TPID yang dibentuk di daerah ini tugasnya hanya mencari informasi saja mengenai kondisi inflasi dilapangan. “Jadi kita meminta TPID agar diberikan kekuatan dapat mengintervensi pasar,” jelasnya.

Selain itu, lanjut John, kunjungan kerja spesifik ke Jateng ini juga ingin mendengarkan paparan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejauh mana bisa mendorong perekonomian di Indonesia.

“Kita ingin melihat target produknya seperti apa, Komisi XI DPR prinsipnya mendukung peran OJK dan tidak ingin masyarakat sulit mengakses jasa keuangan dengan risiko terukur. karena kondisi liberal akan terbuka lebar sekali ada ratusan ribu agen tumbuh yang berfungsi sebagai bank dan terpisah tidak termasuk di dalam badan keuangan nantinya,” paparnya.

Dia mengharapkan, semua dapat memaparkan kondisi pertumbuhan ekonomi, agar data dan informasi dapat dibawa didalam Rapat Komisi untuk memutuskan mengenai asumsi makro di Rapat Kerja Komisi nantinya, jadi semua dapat lebih komprehensif dan lebih realistis,” jelasnya.

(Si) foto: sugeng/parle/hr

Target Pertumbuhan Ekonomi Disinyalir Meleset

Wakil Ketua Komisi XI DPR John E. Rizal mengatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia jauh dari target serta harapan pemerintah. Pasalnya, sejak tiga tahun terakhir perekonomian nasional mengalami perlambatan. Q4 tahun 2014 lalu 5.01 persen, namun pada Q1 tahun 2015 hanya 4.71 persen.

“Kita melihat kondisi ekonomi jauh dari harapan kalau mau sedih mungkin kita harus sedih pertumbuhan kita hanya 4.7 persen pada tingkat nasional untuk awal tahun

2015 ini,”ujarnya saat memimpin Kunjungan kerja spesifik ke Jawa Tengah ke BI, OJK dan pemerintah daerah Jateng, di Semarang, baru-baru ini.

Menurutnya, pada pertemuan dua atau tiga hari lalu dengan pemerintah mereka telah mengusulkan 5.8 persen untuk pertumbuhan ekonomi. Namun, paparnya usulan itu sangat optimis dan kurang rasional ditengah melambannya perekonomian Indonesia.

“Pada pertemuan dua atau 3 hari lalu bersama dengan



Menteri Keuangan, Bapennas, BPS dan BI saya sampaikan juga usulan pemerintah 5.8 persen kurang rasional karena itu harus direvisi agar usulannya wajar,” ungkapnya.

Dia menambahkan, nantinya jika usulan terlalu tinggi DPR juga akan kesulitan dalam meyakinkan publik karena itu perlu dipertimbangkan adanya revisi atau range pertumbuhan ekonomi mendatang. “Harus rasional sehingga DPR dapat meyakinkan publik, dari yang diusulkan dari 5.8 persen menjadi 5.7 persen dan maksimal bisa 5.3 persen bahkan dibawah lima persen nanti,” ungkapnya.

Menurutnya, publik mungkin bisa memaafkan melesetnya asumsi makro pertumbuhan ekonomi ini. karena itu, mari kita realistis mimpi mengejar pertumbuhan 7 persen dalam lima tahun tentunya akan sulit tercapai. “Kalau sekarang pertumbuhan ekonomi hanya 5.2 persen, maka kedepan bisa mencapai 5.4 persen, jadi jika ingin mengejar 9 persen harus dapat rata-rata pertumbuhan ekonomi 7 persen,” jelasnya.

Usulan asumsi makro pertumbuhan ekonomi, lanjutnya, masih digodok bersama dengan pemerintah namun dari usulan resmi yaitu sekitar 5.8-6.2 persen usulan pemerintah, sementara Bank Indonesia lebih longgar usulannya sekitar



Tim Kunspek Komisi XI DPR saat pertemuan dengan Kepala BI Perwakilan Jateng

5.4 sampai 5.8 persen. “Jadi usulan pertumbuhan ekonomi harus agak longgar jika *gainnya* terlalu jauh membuat masyarakat semakin tidak yakin, dan nantinya kesepakatan pemerintah bersama BI, dan DPR tidak akan didengar langsung oleh masyarakat,” paparnya. (Si) foto: [sugeng/parle/hr](#)



Anggota Komisi I DPR Bobby Rizaldi

Usulan Dana Aspirasi Dewan dinilai tidak melanggar fungsi Parlemen dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara atau Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Demikian dikatakan Anggota Komisi I DPR Bobby Rizaldi di ruang kerjanya Gedung Nusantara I Jakarta, Senin (15/6) pagi.

Bobby Rizaldi menambahkan, seperti halnya Dana Aspirasi di Amerika Serikat (*Congressional Earmark*), Filipina dan dinegara lainnya, Anggota Parlemen/Kongres “hanya” mengalokasikan (*directed project*), sesuai fungsi

Dana Aspirasi Tidak Langgar Fungsi Parlemen

penganggaran (Hak Budget), bukan sebagai pelaksana.

Politisi Fraksi Partai Golkar Bobby Rizaldi juga mengatakan, Hak Inisiatif Bugjet ini untuk mengimbangi rencana pembangunan insfrakstruktur melalui eksekutif agar merata, atau bisa disebut *Voice of Voiceless*, serta memastikan agar jangan ada Aspirasi pembangunan dari masyarakat yang tidak tertampung dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

“Misalnya, seorang Bupati yang menang didalam suatu daerah dalam kampanyenya namun Bupati tersebut tidak membangun desa yang tidak memilihnya, maka hal ini bisa diimbangi oleh Wakil yang terpilih dari Daerah tersebut,” jelasnya.

Dia mengemukakan, dalam penyelenggaraan Dana Aspirasi tersebut pengawasannya akan sangat berlapis, karena dana tersebut digunakan berdasarkan Aspirasi rakyat, maka yang pertama di depan adalah rakyat yang akan mengawasi, kedua LKPP/LKPD Daerah, dan tentunya secara Nasional

adalah BPK yang memeriksa. Jadi rakyat pun turut aktif untuk mengawasinya. “Kontroversi soal dana Aspirasi ini sudah pernah dibahas pada tahun 2010 lalu, dan masalahnya cukup klasik, karena kurangnya komunikasi dalam penyampaian ke publik yang komprehensif dan masif,” tegas Bobby.

Dia menegaskan bahwa dirinya tidak tahu besaran yang diusulkan, apa itu 20 milyar atau kurang dari itu, akan tetapi kita akan terus mendorong agar Banggar tetap memperjuangkan hal ini.

“Karena Dana Aspirasi ini bukan kegiatan baru, tapi mekanisme mengalokasikan pembangunan insfrastruktur melalui Hak Inisiatif Budget dari DPR. Bukan uang tapi *directed project* (langsung ke proyek pembangunan) dalam bentuk lima kegiatan pembangunan pemerintah, misalnya membangun jalan sepanjang 10.000 km, yang 78 km nya diarahkan melewati 78 Dapil perwakilan,” pungkas Bobby. (Spy) Foto : [Andri/parle/od](#)

Komisi VII DPR Sepakati Produksi Minyak Maksimal 830 Ribu Barel/Hari



Ketua Komisi VII DPR Kardaya Warnika

Rapat internal dengan anggota Fraksi Komisi VII, belum menyepakati satu angka target produksi minyak tahun 2016, sehingga dibuat asumsi yakni

produksi ditargetkan antara 800.000-830.000 barel/hari.

“Hari ini secara langsung kita menyepakati usulan Kementerian ESDM soal produksi lifting minyak bumi, yang dalam ringkasan asumsi dasar RAPBN 2016 sektor ESDM sebesar 830.000-850.000 barel/hari,” kata Ketua Komisi VII DPR Kardaya Warnika di Gedung DPR, Senin, (15/6).

Menurut Kardaya, melihat hasil rapat internal fraksi serta pandangan dari Kementerian ESDM serta SKK Migas, disepakati rentang *lifting* minyak bumi tahun depan 800.000-830.000 barel/hari.

“DPR dan pemerintah sepakat bahwa rentang *lifting* minyak dalam asumsi dasar RAPBN 2016 adalah 800.000-830.000 barel/hari,” jelasnya. Berdasarkan hasil rapat internal antar fraksi Komisi VII DPR, menghasilkan asumsi produksi migas sebagai beri-

kut:

1. Fraksi PDIP : 810.000-830.000 barel/hari.
2. Fraksi Golkar : 820.000-850.000 barel/hari
3. Fraksi Gerindra: 800.000-830.000 barel/hari
4. Fraksi Demokrat: 810.000-830.000 barel/hari
5. Fraksi PKB : 760.000-800.000 barel/hari
6. Fraksi PKS : 800.000-830.000 barel/hari
7. Fraksi PPP : 800.000-830.000 barel/hari
8. Fraksi Nasdem : 800.000-850.000 barel/hari
9. Fraksi Hanura : 820.000-850.000 barel/hari
10. Fraksi PAN belum menyampaikan pandangan.

(Si) Foto: Naefuroji/parle/od

Pasar Grogol Harus Segera Diperbaiki

Dalam sidak ke Pasar Grogol Jakarta Barat, Kamis (11/6) Komisi VI DPR melihat kondisi pasar kurang memadai dan kurang terawat seperti kondisi kabel-kabel listrik yang kurang tertata dengan baik dan kondisi cat tembok yang mengelupas akibat sudah terlalu lama tidak di perbaiki.

Hal itu disampaikan anggota Komisi VI Bambang Haryo Soekartono bahwa Pasar Grogol yang dikelola pemerintah DKI sangat memprihatinkan. “Kami melihat langsung bahwa keadaan ini tidak cukup layak untuk dikatakan sebagai pasar karena fasilitas yang tidak memadai.

Kondisi pasar yang kurang bersih dan tidak rapi tentu akan berdampak pada minat masyarakat untuk berbelanja di pasar. “Rakyat kita juga menjadi pindah haluan ke mini market untuk berbelanja yang bersih, rapi dan higienis,” imbuh Bambang.

Kondisi pasar tradisional yang bersih, rapi dan higienis tentu menjadi harapan semua rakyat agar ketika berbelanja di pasar tradisional bisa merasakan kenyamanan. Dalam sidak ke Pasar Grogol, Komisi VI menemukan bahwa fasilitas penunjang di pasar kurang memadai seperti saluran air di tempat penjualan ikan, daging dan ayam. Selain itu kondisi gedung yang sudah berusia 24 tahun tentu banyak bagian dari gedung yang sudah usang atau bahkan sudah rusak.

“Ini menjadi catatan penting untuk disampaikan oleh pusat dan pemerintah daerah agar secepatnya memper-



Anggota Komisi VI DPR Bambang Haryo Soekartono

baiki fasilitas pasar-pasar tradisional, tanggung jawab pemerintah untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik untuk rakyat,” terang Bambang.

Komisi VI akan terus mendorong dan terus mengkritik pemerintah agar secepatnya melakukan perubahan dan bukan hanya sekedar wacana belaka. “Momentum ini seharusnya pemerintah bisa lebih mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, pasti kami akan dukung sepenuhnya,” tegas Bambang.

“Rakyat hanya berharap hidup yang aman, nyaman, sejahtera lambat laun daya beli mereka akan naik asal iklim ekonomi kita bagus, kita berharap Kabinet Kerja bisa bekerja dengan baik,” tutup dia. (skr)/foto:iwan armanias/parle/iw.

Komisi IV Apresiasi Masukan Akademisi dan Ahli Kelautan Unhas



Tim Kunker Komisi IV DPR bersama civitas akademika Unhas

Komisi IV DPR RI mengapresiasi masukan dan sumbang saran dari para akademisi dan ahli kelautan dan perikanan di Universitas Hassanudin, Makassar terkait RUU Perlindungan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan yang tengah disusun Komisi IV DPR bersama Pemerintah.

“RUU Perlindungan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan merupakan usulan inisiatif DPR yang masuk dalam Prolegnas 2015 ini. Tujuan kami menggelar jaring pendapat ini tidak lain untuk menciptakan Undang-undang yang komprehensif jangka pendek, menengah dan panjang, serta bisa memuat beberapa ide-ide, dan pemikiran yang sempurna serta tidak berseberangan dengan Undang-undang lain, serta bisa memberikan perlindungan dan pemberdayaan bagi nelayan yang selama ini masih belum terlindungi dan terberdayakan,” jelas Wakil Ketua Komisi

IV, Viva Yoga Mauladi dalam Konsultasi Publik dan Jaring Pendapat di Universitas Hassanudin, Makassar Kamis (11/6).

Ditambahkan Politisi Fraksi PAN selama ini nelayan atau masyarakat pesisir identik dengan kemiskinan, bahkan nelayan terkadang menerima dampak negatif dari kebijakan pemerintah yg tidak memihak dalam jangka pendek kesejahteraan nelayan.

Beberapa masukan dari para akademisi Universitas Hassanudin yang notabene merupakan ahli atau pakar perikanan dan kelautan baik terkait definisi atau redaksional di berbagai pasal, maupun penambahan content atau isi dari undang-undang tersebut. Prof Jamaluddin Jompa misalnya, memberi masukan akan tentang perikanan berbasis hak. Dimana didalamnya mengatur *tradisional fishing right* (hak perikanan atau nelayan tradisional) yang harus terus terlindungi.

Sementara Prof Mardiana berpendapat untuk memasukan point kerjasama dalam UU ini. Termasuk di dalamnya sistem bagi hasil yang efektif, efisien dan berkeadilan.

Sedangkan Prof Yusran memberi masukan akan adanya asuransi dan penjaminan atas resiko nelayan.

“Kami mengapresiasi masukan dan pendapat-pendapat tersebut, yang kemudian akan kami olah dan diperdalam kembali. Insya Allah tahun ini Undang-undang tersebut dapat segera tersusun, disahkan dan kemudian bisa segera diundangkan,” harap Viva yang diamini oleh seluruh Tim Kunjungan Kerja Komisi IV yang terdiri dari Ono Surono, Ichsan Firdaus, Hamka B Kadi, M Nasyit Umar, Indira Chunda Thita, Andi Akmal Pasluddin, Irna Narulita, Sulaeman Hamzah. (Ayu) Foto: Ayu/parle/od

Daya Beli Masyarakat Menurun

Kenaikan bahan pangan menjelang puasa mengakibatkan menurunnya daya beli masyarakat ditambah lagi dengan melemahnya nilai tukar rupiah yang membebani masyarakat. Kenaikan bahan-bahan pangan bukan hanya menurunkan jumlah pembeli namun berdampak pada daya beli, masyarakat biasanya membeli cabai sebanyak 1 kg namun setelah kenaikan pembelian dikurangi menjadi ½ kg hingga ¾ kg.

Wakil Ketua Komisi VI Azam Azman Natawijaya saat memimpin sidak ke Pasar Grogol Kamis (11/6) mengatakan, kenaikan bahan pangan mengakibatkan jumlah pembeli konsumsi rumah tangga menurun, baik jumlahnya maupun volume barang.

Terkait kenaikan beberapa bahan pokok Komisi VI berencana akan memanggil Menteri Perdagangan untuk menanyakan apakah kenaikan tersebut masih dalam batas-batas kewajaran. Yang terpenting, kata Azam, bukan pada menstabilkan harga-harga bahan pangan namun bagaimana pemerintah mampu meningkatkan daya beli masyarakat sehingga kenaikan tidak akan berdampak pada akan daya



Wakil Ketua Komisi VI Azam Azman Natawijaya sidak di pasar Grogol

beli masyarakat. “Jika daya beli masyarakat kuat maka harga sebarang pasti akan dibeli masyarakat,” ungkap Azam.

Menurutnya, terkait dengan peningkatan daya beli masyarakat pihaknya akan membicarakan dengan pemerintah

bagaimana meningkatkan daya beli tersebut. Ia menegaskan kembali bahwa domain meningkatkan daya beli masyarakat itu tanggungjawab dari pemerintah. Walaupun rata-rata kenaikan bahan pangan hanya kisaran 30% namun demand (permintaan) naik hingga 50%.

Azam Azman mengingatkan pemerintah saat ini nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) kembali ter-

depresiasi dan menembus angka Rp13.400,00 jangan sampai dolar tersebut mencapai Rp15.000,00. "Kita harapkan dolar segera menurun karena berdampak pada penurunan daya beli masyarakat. Pemerintah jangan menganggap sederhana atas melemahnya rupiah. Kewajiban pemerintah untuk meningkatkan daya beli masyarakat," kata Azam menegaskan. (skr)/foto:iwan armanias/parle/iw.

Komisi IV Janjikan Kepastian Hukum Masyarakat Nelayan dan Pembudidaya Ikan



Tim Kunspek Komisi IV DPR pertemuan dengan Unsrat

Komisi IV DPR RI optimis dapat segera menyelesaikan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan (PPNPI) pada tahun 2015 ini.

Ketua Komisi IV DPR Edhy Prabowo mengatakan RUU ini untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan sektor perikanan. "RUU ini penting segera direalisasikan untuk memberikan kepastian hukum masyarakat khususnya dalam perlindungan dan pemberdayaan nelayan dan pembudidaya ikan," kata Edhy Prabowo, dalam *Forum Group Discussion* di Universitas Sam Ratulangi, Manado, Kamis (11/6).

Edhy memaparkan ruang lingkup pengaturan RUU ini adalah pe-

rencanaan strategi perlindungan yang dilakukan melalui penyediaan prasarana perikanan dan kemudahan memperoleh sarana produksi perikanan. Selain itu jaminan kepastian usaha, jaminan resiko penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan, penghapusan praktek ekonomi biaya tinggi dan bantuan di wilayah perbatasan serta lintas negara.

"Strategi pemberdayaan yang dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, kemitraan usaha perikanan, penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan, kemudahan akses ilmu pengetahuan teknologi dan informasi, penguatan kelembagaan nelayan dan pembudidaya ikan, pembiayaan dan pendanaan pengawasan dan peran serta masyarakat,"

paparnya.

Dalam kesempatan tersebut, Rektor Universitas Sam Ratulangi Ellen Joan Kumaat menjelaskan bahwa negara Indonesia sebagai negara maritim yang memiliki luas perairan 65 persen wilayah Indonesia. Dengan asumsi potensi produksi lestari ikan laut sebesar 6,51 juta ton pertahun atau 8,2 persen dari total potensi produksi ikan laut dunia. Namun menurutnya potensi tersebut belum dapat mensejahterakan rakyat Indonesia.

"Potensi yang tergolong tinggi menjadi hal yang ironis ketika kita melihat pendapatan rata-rata nelayan dan pembudidaya ikan yang sebagian besar ternyata masuk dalam kategori miskin serta tidak berdaya dalam memenuhi kebutuhan hidup jangka panjang," ungkapnya.

Lebih lanjut dikatakan, Konvensi ILO (*International Labour Organisation*) tentang pengaturan tenaga kerja telah menetapkan bahwa pekerjaan di bidang perikanan khususnya penangkapan sebagai pekerjaan beresiko tinggi, serta rawan terhadap terjadinya pelanggaran hak-hak pekerja di atas kapal perikanan. "Pekerja perikanan rawan terhadap tindak pidana yang mengancam sumber daya kelautan dan perikanan, serta penangkapan liar atas biota-biota laut yang dilindungi," tambahnya. (as), foto : agung sulistiono/parle/hr.

Makanan Tanpa Label Perlu Diwaspadai

Peredaran makanan kemasan berupa kue basah dan makanan anak-anak tanpa label banyak beredar di pasar tradisional. Ini perlu diwaspadai agar tak merugikan kesehatan ma-

sarakat yang mengonsumsinya.

Demikian penegasan Anggota Komisi VI DPR RI Endang Srikarti Handayani (dapil Jateng V) saat meninjau pasar Tebet Timur, Jakarta Selatan, Kamis

(11/6). Bahkan, ada makanan anak-anak produk impor yang beredar tanpa label. Ini perlu pengawasan ketat dari pemerintah.

"Makanan anak-anak impor tanpa ada label daluwarsanya, itu sangat tidak boleh dikonsumsi oleh para tunas bangsa. Sangat membahayakan. Ada pula bakpia produksi rumahan yang tanpa label. Semuanya membaha-



yakan. Mestinya dinas perdagangan harus membina produsen makanan untuk memuat label kedaluwarsanya. Dan itu tidak dipungut biaya,” ungkap Endang.

Dinas perdagangan, imbau Endang, agar membuat surat edaran kepada para pedagang untuk tidak menerima produk makanan tanpa label informasi kandungan dan masa berlakunya. Ini penting untuk melindungi konsumen. Apalagi jelang puasa ini banyak produk makanan diproduksi secara besar-besaran. “Saya juga tekankan kepada dinas perdagangan untuk mengambil sampel makanan anak-anak impor, karena tidak ada info kedaluwarsanya,” harap Endang.

Sementara soal harga-harga komoditi di pasar tradisional, politisi Partai Golkar itu, menilai masih relatif normal. Untuk sayur mayur bila harganya tinggi sedikit, tak masalah agar bisa mensejahterakan para petani. Para petani juga butuh kebahagiaan untuk menyambut lebaran bersama keluarganya.



Anggota Komisi VI DPR RI Endang Srikarti Handayani

“Dengan kunjungan ke pasar tebet ini, saya berharap ada sinergi dengan Kementerian Perdagangan untuk sesering mungkin mengunjungi

pasar sambil membina para pedagang. Konsumen perlu perlindungan atas makanan-makanan yang mereka beli,” imbuh Endang. (mh) Foto: Husen/parle/od

Komisi VI Minta PTPN VII Tingkatkan Kinerja dan Keuangan



Tim Kunker Komisi VI DPR saat meninjau PT Sugar Labinta, Lampung

Komisi VI DPR meminta PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VII meningkatkan kinerja dan keuangan agar dapat berkontribusi meningkatkan produksi gula dan pajak serta pembagian deviden. Selain itu bisa berkontribusi lebih banyak bagi lingkungan sekitar serta mendorong pembangunan kemitraan.

Harapan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR Dodi Reza Alex Noerdin ketika memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pemprop. Lampung, Direksi PTPN VII, Direksi PT Sugar Labinta dan Direksi PT Adi Karya Gemilang dalam rangkaian kunker spesifik di Lampung, Selasa

(16/6) lalu.

Dengan peningkatan kinerja, Komisi VI menegaskan optimalisasi PTPN VII bisa dicapai sebagai anak perusahaan Holding Perkebunan dan dapat meningkatkan inovasi budi daya tebu sehingga dapat meningkatkan pasokan tebu serta dapat mempertahankan kualitas tebu yang diolah oleh pabrik gula (PG).

Dirut PTPN VII Kusumandaru menjelaskan, PTPN VII merupakan penggabungan unit usaha PT Perkebunan X, XXXI dan XI dan XXIII (Persero) yang berada di Lampung, Sumsel dan Bengkulu. Berdasarkan PP No.72/2014 tanggal 17 September 2014 Perusahaan Perseroan PTPN VII berubah menjadi PTPN VII dengan perubahan struktur 10% negara dan 90% PTPN III (Persero).

Menurut Kamandaru, meski total penjualan perusahaan yang memiliki PG di Distrik Bungamayang dan Cinta Manis tersebut terus meningkat tetapi labanya turun akibat pembayaran bunga bank. PG Bungamayang kapasitas 7.000 TCD dan akan ditingkatkan kapasitasnya sampai tahun 2018 menjadi 10.000 TCD. Sedangkan PG Cinta Manis kapasitas terpasang 5.000 TCD dan akan ditingkatkan menjadi 5.500 TCD pada tahun 2017.

Permasalahan yang dihadapi PTPN VII antara lain kesulitan perolehan varietas unggul yang menyebabkan tingkat produktivitas rendah dan keterbatasan areal pengembangan HGU. Sedangkan factor lain keterbatasan dana untuk revitalisasi pabrik dan kondisi jalan khususnya provinsi dan kabupaten sehingga menghambat kelancaran transportasi

hasil dan sarana produksi.

Di bidang pemasaran, lanjut Kamandaru, kebijakan pemerintah mengenai tata niaga gula, khususnya berkaitan dengan impor gula rafinasi dan impor *raw sugar*, sangat berdampak pada harga gula di pasar lelang. Ditambahkan,

pada tahun 2015 ini PTPN VII mengajukan Dana Penyer-taan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 175 miliar yang direncanakan untuk investasi *on farm* maupun *of farm*, namun masih belum cair. (mp) foto: mastur/parle/od

Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan Amanat UU MD3



Anggota Komisi VII DPR Effendi Simbolon pada acara Dialektika Demokrasi

Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) merupakan amanat UU Nomor 17 tahun 2014 tentang MD 3 (MPR, DPR, DPD dan DPRD) sebagai upaya untuk mendekatkan anggota DPR RI dengan masyarakat. Program itu sesuai dengan usulan atau program yang disampaikan oleh masyarakat di daerah pemilihan (Dapil) masing-masing anggota DPR RI, di mana setiap anggota tidak memegang dana untuk pembangunan itu sendiri.

Hal tersebut ditegaskan oleh Wakil Ketua Tim UP2DP dari Fraksi Golkar Muhammad Misbakhun dalam diskusi dialektika demokrasi “Pro-Kontra Dana Aspirasi UP2DP” bersama anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Effendi Simbolon, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Jakarta Rakhmat Bagdja, dan pengamat politik dari Universitas Hasanudin Makasar Adi Suryadi Cula di Gedung DPR RI Jakarta, Kamis (18/6).

“Selain usulan masyarakat, juga usulan camat, bupati dan gubernur bisa disampaikan melalui UP2DP ini, karena dalam pertarungan Pilkada, daerah calon kepala daerah yang kalah biasanya tidak dibangun oleh pemenang Pilkada. Tapi, usulan ini terserah pe-

merintah untuk menindaklanjuti, karena anggota DPR bukan pengguna kuasa anggaran,” kata Misbakhun.

Sementara itu, Effendi Simbolon mempersoalkan nomenklatur dana aspirasi yang bisa menimbulkan berbagai interpretasi, apalagi dalam bentuk uang Rp 20 miliar setiap anggota DPR. Padahal sudah ada dana tunjangan re- ses Rp 150 juta/bulan.

“Jadi, sejak awal saya menolak program ini karena tak ada dalam Tupoksi (tugas pokok dan fungsi) anggota DPR RI mengingat DPR bukan eksekutor. Di mana sebanyak 560 anggota DPR X Rp 20 M X 5 tahun = Rp 12 triliun. Lalu, apa uang Rp12 triliun itu sudah menjadi kewenangan pemerintah dan juga dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan (Musrebang)?” tegas Effendi Simbolon.

Kalau berurusan dengan rakyat di Dapil lanjut Effendi Simbolon, DPR tinggal mengawasi pelaksanaan anggaran pembangunan yang sudah dialokasikan kepada Musrebang. “Kan ada dana alokasi khusus (DAK), dana alokasi umum (DAU), dan dana transfer daerah, yang jumlahnya ratusan miliar rupiah. Tapi, kalau hanya sebagai usulan, tak masalah. Jadi, saya percaya

pada tim UP2DP sepanjang bisa mengkomodir berbagai kekhawatiran terhadap dana aspirasi yang bisa dilewengkan untuk pencitraan politik. Namun, kalau tidak bisa, ya tidak usah dipaksakan,” pungkasnya.

Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Jakarta, Rakhmat Bagdja menegaskan jika program anggaran dan pengawasan antara DPR dan pemerintah harus sama-sama kuat. Sebab, dalam kasus pembangunan Universitas Andalas Sumatera Barat, yang rusak akibat gempa, di mana anggaran pembangunannya masih kurang Rp 80 miliar, sampai saat ini terbukti tidak ditindaklanjuti oleh pemerintah setempat, sehingga macet.

“Nah, dalam kasus seperti inilah DPR RI bisa mendesak pemerintah merealisasikan pembangunan kampus itu dan itu bisa dialokasikan melalui program UP2DP ini,” tegas Rakhmat.

Hanya saja kemudian menjadi masalah kalau nomenklatur dana aspirasi, yang seharusnya mengawal-mengawasi dana aspirasi yang dijalankan oleh pemerintah. “Usulan itu bagus dan tidak melanggar *check and balances*, maka fungsi DPR harus diperkuat dalam mengawasi pelaksanaan APBN Rp 2.400 triliun. Apalagi KPK makin hancur,” ujarnya.

Sedangkan pengamat politik dari Universitas Hasanudin Makasar Adi Suryadi Cula menilai program UP2DP itu pragmatis, sehingga tak terlihat urgensinya bagi fungsi DPR sendiri, di tengah citra DPR masih buruk. “Saya khawatir implementasi dari program ini untuk menangani Rp 20 M per anggota? Mafia baru bisa muncul dalam pengelolaan anggaran ini. Untuk itu, ide yang bagus ini mekanismenya perlu dijelaskan kepada masyarakat agar tidak menimbulkan berbagai kecurigaan masyarakat,” pungkasnya.

(sc) Foto: Andri/parle/od.

Komisi IX Dorong Pemda Tingkatkan Anggaran Pendidikan Kedokteran



Tim Kunspek Komisi IX DPR berdialog dengan Direksi RS. Pirngadi, Medan

Pemerintah daerah perlu memberikan perhatian pada anggaran pendidikan di bidang kedokteran. Kompetensi dokter, sebagai tenaga medis maupun sebagai tenaga pengajar perlu terus ditingkatkan mengingat pesatnya perkembangan ilmu kedokteran.

Demikian salah satu hal yang menjadi bahan diskusi saat Tim Kunjungan Spesifik Komisi IX bertemu dengan jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kota Medan, Pimpinan dan Dokter RSUD Pirngadi, dan beberapa stakeholder bidang kesehatan, di RS Pirngadi, Medan, Provinsi Sumut, Senin (15/06/15).

“Jangan sampai kemampuan dokter yang ditelurkan dari pendidikan kedokteran akan seperti itu-itu saja dari setiap universitas. Makanya saya pesankan kepada jajaran Pemda Sumut, supaya anggaran pendidikan kesehatan itu harus disediakan. Pemda harus turun tangan,” kata anggota Komisi IX Zulfikar Achmad.

Ia menambahkan khusus bagi dokter yang juga merangkap sebagai dosen harus semakin mengasah keilmuannya. Jangan sampai pengajaran materi kedokteran sama saja dari waktu ke waktu. Jika sampai begitu, perkembangan pendidikan kedokteran tidak akan berkembang.

“Peningkatan kompetensi dokter itu sangat penting sekali. Kalau tidak, ya akan seperti ini terus. Pengalaman saya sebagai kepala daerah di Jambi, anggaran untuk pendidikan, seminar, ataupun lainnya terhadap tenaga medis, saya sudah siapkan,” tutur dia.

Pemerintah Daerah menurutnya memiliki peran penting

dalam peningkatan pendidikan para tenaga medis. Apalagi, dengan otonomi daerah, sehingga Pemda juga harus turun tangan ikut memikirkan kondisi bidang kesehatan di wilayahnya.

“Pemerintah daerah sangat berperan bagi perkembangan kesehatan di daerahnya. Ini kan otonomi daerah. Harus dipikirkan, bagaimana untuk meningkatkan taraf kesehatan masyarakat ini. Kalau tenaga medisnya tidak diberikan peningkatan pendidikan tambahan, misalnya dalam kurun waktu 10 tahun, ilmu sudah sangat berbeda sekali perkembangannya,” ujar politisi FPD ini.

Hal senada diungkapkan Anggota Komisi IX DPR Irgan Chairul Mahfisz (F-PPP). Ia menegaskan, peningkatan mutu dan kompetensi dokter itu sangatlah penting.

“Upgrade ilmu bagi para dokter itu sangat penting. Apalagi para dokter ini juga melayani pendidikan untuk para calon dokter. Untuk mendapatkan pengetahuan yang luas, penguasaan teknologi-teknologi baru, peningkatan kemampuan, sekaligus *refreshment* terhadap tenaga dokter yang saat ini juga mendidik calon baru,” urai Politisi asal Dapil Banten ini.

Sebelumnya, salah seorang dokter senior di RS Pirngadi, Dr. Rosyid mengatakan, Pemerintah belum memperhatikan masalah peningkatan kompetensi dokter ini. Bahkan, jika dokter ingin menempuh pendidikan baru melalui seminar, misalnya, harus merogoh kantong sendiri. Sehingga dirasa semakin memberatkan profesi dokter. (sf/iky) foto: sofyan/parle/hr



Tim Kunjungan Spesifik Komisi II DPR RI saat pertemuan dan meninjau DOB Seram Bagian Timur, Maluku, Senin (15/06) Foto: Andri/Parle/HR



Tim Kunjungan Spesifik Komisi IV DPR RI saat mengunjungi Balai Benih Ikan Air Tawar di Bantimurung, Maros, Sulawesi Selatan, Kamis (11/6). Foto: Ayu/Parle/HR



Tim Kunjungan Spesifik Komisi VI DPR RI melihat langsung proses pembuatan gula di pabrik gula PT Sugar Labinta, Lampung, Selasa (16/6). Foto: Mastur/Parle/HR